

ANALISIS PENGARUH JUMLAH OBYEK WISATA, JUMLAH WISATAWAN, TINGKAT HUNIAN HOTEL DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA DI JAWA TENGAH

MURTI HANDAYANI

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Jl.Nakula No 5-11 Semarang

ABSTRAKSI

Pendapatan obyek wisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah dan faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan obyek pariwisata yang diterima masing-masing daerah tersebut. Dimana hal ini dapat menggambarkan situasi perekonomian yang layak dan setiap perjalanan pariwisata akan menguntungkan bagi sisi perekonomian dari suatu daerah yang dikunjungi. Dalam hal ini biasanya kondisi perekonomian di Jawa Tengah cukup baik dan berimbang ke Pendapatan yang tentunya akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi obyek

pariwisata di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini dicapai dengan metode Model analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan data *time series* selama lima tahun (2007-2011) dan data *cross section* sebanyak 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dengan model regresi tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat signifikan 0,003 untuk jumlah obyek wisata, signifikan 0,000 jumlah wisatawan dan signifikan 0,004 pendapatan perkapita dengan tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesisnya diterima dan berpengaruh positif terhadap retribusi. Sedangkan tingkat hunian hotel dengan nilai signifikan 0,245 maka hipotesisnya ditolak, karena tingkat probabilitas $> 0,05$ terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kata Kunci : Retribusi Obyek Pariwisata, Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel dan Pendapatan Perkapita.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara tersebut akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata tersebut. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu, karena berwisata bisa menghilangkan kejenuhan, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya, bisa berbelanja dan bisnis, (Austriana, 2005).

Pariwisata merupakan hal yang

komplek dan bersifat unik, karena pariwisata bersifat multidimensi baik fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pariwisata juga menawarkan beragam jenis wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam jenis wisata yang diminati oleh masyarakat. Menurut Salah Wahab dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Karena dalam proses penyediaan lapangan kerja, standar hidup bagi sektor-sektor produktivitas sangat diminati oleh masyarakat dan sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga menyediakan industri-industri klasik yang meliputi industri kerajinan tangan dan cinderamata, Penginapan dan transportasi yang ekonomis juga dipandang sebagai industri (Salah, 2003).

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Secara tidak langsung juga menimbulkan permintaan modal barang dan bahan baku (*Investment Derived Demand*). Dalam usaha untuk memenuhi permintaan wisatawan diperlukan sarana dan prasarana di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1987).

Pariwisata dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Dari sudut sosial bahwa kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan

tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepariwisataan. Segi ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Segi budaya dalam pariwisata merupakan sarana untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan daerah tujuan wisata. Dengan sarana inilah dapat mendorong kreativitas rakyat dalam menggali dan meningkatkan serta melestarikan seni budaya daerahnya (Spillane, 1987).

Jawa Tengah memiliki banyak obyek wisata yang sangat menarik. yang termasuk obyek wisata di Jawa Tengah antara lain Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah), (Museum Jawa Tengah Ranggawarsita) dan Museum Rekor Indonesia (MURI). Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur, yakni monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9 yang terletak di Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Pawon juga terletak satu kompleks dengan Borobudur. Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno. Kompleks Candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran Kabupaten Semarang.

Jumlah Wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan karena para pengunjung tidak hanya berasal dari Jawa Tengah melainkan dari berbagai daerah

maupun mancanegara. Setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata dapat menikmati keindahan dan panorama yang ada di Jawa Tengah. Bagi wisatawan yang datang dari luar daerah telah disediakan Hotel, Losmen dan Penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap. Semakin banyak wisatawan yang menyewa kamar hotel maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh untuk tingkat hunian hotel tersebut (Austriana, 2005).

Tingkat Hunian Hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Austriana, 2005). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila para wisatawan tersebut menginapnya lebih lama.

Pendapatan Perkapita merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi dan mereka mempunyai uang yang cukup untuk

membiayai perjalanan wisata. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah (Austriana, 2005).

Dalam rangka pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting untuk menentukan dan meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dan merupakan komponen utama untuk memperbaiki struktur ekonomi dari pembangunan daerah tersebut (Salah, 2003).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dan harus dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, saat ini ditunjang berbagai sektor-sektor pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat yang bisa mengelola berbagai sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Blakely dalam Kuncoro (2004).

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisikan tentang pembagian wewenang dan fungsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. UU No. 32 berisi tentang Perimbangan Keuangan dan pengaturan pembagian sumber daya Keuangan antara Pusat dengan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut

membawa perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberi peluang untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Kebijakan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diatur sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerahnya masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh daerah, ini merupakan cermin keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Susiana, 2003). Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan sumber tersebut adalah pajak daerah, seperti sektor pariwisata yang bersifat multisektoral, meliputi hotel, restoran, usaha wisata dan perjalanan, pelatihan dan transportasi.

Penelitian tentang penerimaan pendapatan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Satrio, Dicky (2002) tentang perkembangan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata di Kabupaten Blora,

menggunakan variabel Independen : jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan, jumlah pengunjung, obyek wisata, kamar hotel dan dana pengembangan. Dengan menggunakan uji Regresi linear berganda menunjukkan hasilnya signifikan dan berpengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata, kecuali jumlah kamar dan dana pengembangan berpengaruh negatif. dan Penelitian Austriana, Ida (2005) tentang penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Jawa Tengah. Dengan variabel jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel berbintang dan melati, jumlah sarana angkutan, pendapatan perkapita dan jumlah objek wisata. Dengan menggunakan uji regresi linear berganda menunjukkan hasilnya signifikan dan berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah, kecuali jumlah objek wisata berpengaruh negatif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah. Dengan variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan menunjukkan hasil yang diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah:

“ANALISIS PENGARUH JUMLAH OBYEK WISATA, JUMLAH WISATAWAN, TINGKAT HUNIAN HOTEL DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI OBYEK PARIWISATA DI JAWA TENGAH”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan obyek pariwisata di Jawa Tengah ?

Telaah Teori

Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata

Pendapatan obyek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

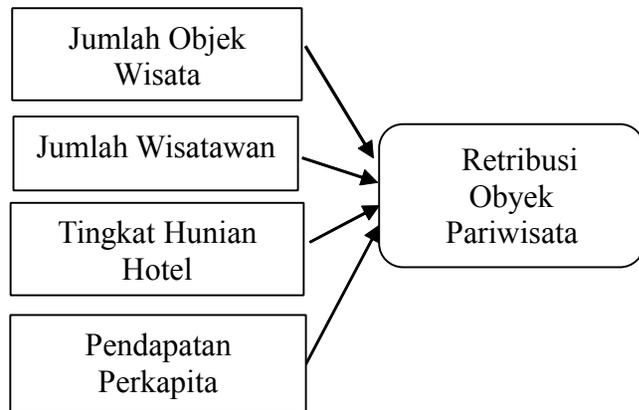
Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran.

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas,dkk 1989:95).

Kerangka Konseptual

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Analisis Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata di Jawa Tengah” antara lain variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan, variabel tingkat hunian hotel dan variabel pendapatan perkapita. Yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H₁ : Jumlah Obyek Wisata berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata.

H₂ : Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata.

H₃: Tingkat Hunian Hotel berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata.

H₄: Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah, sedangkan variabel independen adalah jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif yaitu

data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung berdasarkan pendapatan pertahun yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data yang diperlukan adalah data berupa jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita dan pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa angka pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah tahun 2007-2011 dan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal ekonomi yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif. Dalam melakukan pengamatan terhadap variabel yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga data tersebut diolah dengan alat analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi ini mempunyai hubungan erat antara variabel dependen (terikat) satu atau lebih dengan variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk menghasilkan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai

variabel independen yang ditentukan (Gujarati, 2003).

Bentuk umum dari persamaan model ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Obyek Pariwisata
- X₁ = Jumlah Obyek Wisata
- X₂ = Jumlah Wisatawan
- X₃ = Tingkat Hunian Hotel
- X₄ = Pendapatan Perkapita
- α = Konstanta
- β₁ β₂ β₃ β₄ = Koefisien Regresi
- e = Kesalahan Gangguan / Error

Pembahasan

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa secara simultan jumlah wisatawan berpengaruh pada retribusi obyek pariwisata, sedangkan jumlah obyek pariwisata, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata.

Tabel 4.11
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	T	Sig.
JOP	0,086	3.014	.003
JW	1.801123559619.952	10.778	.000
THH	8.896826712414.605	1.166	.245
PP	-9.310297313914.913	-2.936	.004

Pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Retribusi Obyek Pariwisata (H1)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa jumlah obyek wisata memiliki tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah obyek wisata

berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata. Kabupaten/Kota yang menunjukkan jumlah obyek wisata berpengaruh terhadap retribusi, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Semarang. Sebagai salah satu contoh Kabupaten Banyumas pada perhitungan data mentah untuk variabel jumlah obyek wisata menunjukkan angka 9 (2007), 11 (2008), 13 (2009), 12 (2010), 14 (2011). Dengan jumlah obyek wisata yang selalu meningkat dapat dikatakan berpengaruh terhadap retribusi, karena dengan jumlah obyek wisata tersebut pemerintah dapat meningkatkan pendapatan retribusi melalui obyek wisata.

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Retribusi Obyek Pariwisata (H2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa jumlah obyek wisata memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata. Kabupaten/Kota yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap retribusi, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan. Sebagai salah satu contoh Kabupaten Cilacap pada perhitungan data mentah untuk variabel jumlah wisatawan menunjukkan angka 201821 (2007), 212879 (2008), 475099 (2009), 540088 (2010), 854193 (2011) dengan nilai jumlah wisatawan yang tinggi membuat variabel jumlah wisatawan berpengaruh terhadap retribusi, karena dengan jumlah wisatawan yang tinggi maka dapat menambah pendapatan retribusi.

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap Retribusi Obyek Pariwisata (H3)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat hunian hotel memiliki tingkat signifikansi 0,245 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata. Kabupaten/Kota yang menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap retribusi, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu contoh Kabupaten Wonogiri pada perhitungan data mentah untuk variabel tingkat hunian hotel menunjukkan angka 13874 (2007), 16228 (2008), 15220 (2009), 15148 (2010), 18733 (2011). Dengan nilai tersebut, tingkat hunian hotel menunjukkan data yang tidak stabil dan selalu mengalami penurunan, sehingga tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap retribusi.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Retribusi Obyek Pariwisata (H4)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat hunian hotel memiliki tingkat signifikansi 0,004 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh terhadap retribusi obyek pariwisata. Kabupaten/Kota yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh terhadap retribusi, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga. Sebagai salah satu contoh Kabupaten Cilacap pada perhitungan data mentah untuk variabel pendapatan perkapita menunjukkan angka 11140846 (2007), 11689092 (2008), 12302859 (2009), 12998128 (2010),

13749105 (2011) dengan nilai pendapatan perkapita yang tinggi membuat variabel jumlah wisatawan berpengaruh terhadap retribusi, karena dengan pendapatan perkapita yang tinggi maka dapat menambah pendapatan retribusi.

Simpulan

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel Jumlah Obyek Wisata berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Obyek Pariwisata.
2. Variabel Jumlah Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Obyek Pariwisata.
3. Variabel Tingkat Hunian Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Obyek Pariwisata.
4. Variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Obyek Pariwisata.

Saran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap retribusi. Disarankan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten untuk meningkatkan penerimaan potensi pajak hotel, sehingga akan lebih baik jika Pemerintah dapat membuat suatu regulasi yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan hotel dan penetapan pajaknya harus memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, seperti jumlah kamar dan unit kamar yang terjual. Dari pihak hotel sendiri diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dimiliki untuk lebih dapat meningkatkan tingkat hunian kamar yang dimiliki.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan hanya 5 tahun, akan lebih baik jika periode waktunya lama sehingga dapat lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi obyek pariwisata di Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Austriana, Ida. 2005, "*Analisis Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Jawa Tengah*". Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang
- Devas, N., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. 1989. "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*". (terjemahan oleh Masri Maris) UI- Press. Jakarta
- Ghozali, Imam.2006. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*". Edisi Empat, Badan Pengelola Universitas Diponegoro Semarang
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill, New York
- Harits, Benyamin. 1995. "*Peran Administrator Pemerintah Daerah, Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemda Tingkat II Se-Jawa Barat*". Prisma, No. 4 Tahun XXIV, 81 – 95
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. "*Metodologi Penelitian Bisnis*". Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Koho. 2001. "*Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*". Cetakan ke 5 PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, Mudarajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Munawir, S. 1997. *Perpajakan*. Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua. Yogyakarta
- Pleanggra, Ferry. 2012. "*Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Vol.1 No.1
- Rudi, Badrudin.2001. "*Menggali Sumber pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Membanguan Industri Pariwisata*". Kompak.No.3. Hal.1-13
- Salah, Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Santoso, Bagus. 1995. "*Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman*". Prisma, No. 4 Tahun XXIV, 19-35
- Satrio , Dicky. 2002. "*Perkembangan Pendapatan Pemerintah Daerah dari Sektor Pariwisata di*

Kabupaten Blora dan faktor yang Mempengaruhinya". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekaran, Uma, 2009. "*Research methods for business*". Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta

Spillane, James J.DR.2003. "*Pariwisata Indonesia*". Yogyakarta : Kanisius

Sugiyono. 2003. "*Metode Penelitian Bisnis*". Alfabeta. Bandung

Susiana. 2003. "*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor pariwisata, di Kota Surakarta (1985-2000)*". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. 2009. *Tentang Pengertian Pariwisata dan Peraturan yang Berlaku*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. 2004. *Tentang Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001. 2001. *Tentang Retribusi Daerah*.